

FENOMENA

JURNAL PENELITIAN ISLAM INDONESIA

ISSN: 1412 5420

Volume 9. Nomor 2, Oktober 2010

FENOMENA

Merupakan jurnal berkala, terbit dua kali dalam setahun setiap bulan April, Oktober. Redaksi mengundang para dosen, peneliti untuk menyalurkan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah. Tulisan masih orisinal, dan belum dimuat di media lain. Naskah diketik dengan satu setengah spasi, dan panjang tulisan 13-17 halaman kertas A4 (lebih lanjut lihat petunjuk bagi penulis).



ALAMAT REDAKSI

FENOMENA
Jurnal Penelitian Islam Indonesia
Jl. Jumat 94 Mangli Jember. Tlp. (0331)
487550-427005. Fax. 427005
Email: redaksi_fenomena@yahoo.com

TIM PENYUSUN JURNAL FENOMENA

KETUA PENYUNTING

Sofkhatin Khumaidah

WAKIL KETUA PENYUNTING

M. Saiful Anam

PENYUNTING PELAKSANA

Pujiono

Imam Machfudi

M. Ardiansyah

M. F. Hidayatullah

Ninuk Indrayani

MITRA BESTARI

H. Moh. Khusnuridlo

Muniron

H. Aminullah

H. Titeek Rohanah Hidayati

TATA USAHA

Mahrus

Marica Fitriana

Abd. Hafid

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
KYAI NU DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF TEORI STRUKTURASI GIDDENS <i>UBAIDILLAH</i>	1-16
STRATEGI KULTURAL DAN REVITALISASI TRADISI AGAMA DALAM ARUS BUDA- YA KONSUMEN (Studi Tentang Tradisi “Maulidan Jawiyan” di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus) <i>SAIFUDDIN</i>	17-32
PEMBERDAYAAN DAI PEREMPUAN & KESETARAAN JENDER MELALUI LEARNING ORGANIZATION DI LEMBAGA DAKWAH NU (LDNU) JEMBER <i>HEFNI ZAIN</i>	33-42
TRANSFORMASI NILAI-NILAI MORAL ISLAMI DALAM NOVEL KARYA RAMADHAN K.H. SEBAGAI DAKWAH KULTURAL <i>ABD. RAHMAN D.S</i>	43-48
PERAN GANDA PEREMPUAN DAN PROBLEMATIKANYA DALAM MENDIDIK ANAK (STUDI TERHADAP IBU YANG BEKERJA DI PERKEBUNAN PTPN XII SEMPOL KABUPATEN BONDOWOSO) <i>ST MISLIKHAH</i>	49-58
IMPLEMENTASI METODE PROFIT AND LOSS SHARING DI PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada PT BPRS Jabal Tsur Pandaan Pasuruan) <i>MARIYAH ULFAH</i>	59-70
AUDIO VISUAL SEBAGAI MEDIA DALAM PENGAJARAN KETERAMPILAN MENULIS ESAI DESKRIPTIF <i>ESTI KURNIASIH</i>	71-80
MEMBONGKAR KEKERASAN DI BALIK METAFOR NAK JAWA <i>SITI RAUDLOTUL JANNAH</i>	81-90
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2008 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG <i>BANI</i>	91-102
PERGESERAN NILAI JILBAB: Fenomena Bentuk dan Model Jilbab Muslimah <i>TTIN NUR HIDAYATI</i>	103-116

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

I. KONSONAN

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (vowel)	ء = ' (vowel)
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	ة = t

II. VOKAL PENDEK

ـُ = u
ـِ = i
ـَ = a

III. VOKAL PANJANG

ـُو = ū
ـِي = ī
ـَا = ā

IV. DIFTONG

ـَو = au
ـَي = ai

V. PEMBAURAN

ال = al
الـش = al-Sy...
وال = wa al

KYAI NU DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF TEORI STRUKTURASI GIDDENS

Oleh:

UBAIDILLAH

Dosen STAIN Jember Jurusan Tarbiyah

Abstract

This research discussed about NU elders, politic, and civil society development agenda in Pasuruan. Giddens theory (1984) about structuralization is used as point of departure to develop the main themes which are relevant with the data. The purpose of this research is to understand dialect complexity within structural and agency which put the elders (agent) as creative individual and has transformative capacity to produce and reproduce structure which one side has limited tendency (limiting-disabling) and on the other side is enabling the action, all of that were done by the elder in the position as religion elite to develop civil society. This theme becomes interesting because many NU elders which were involved directly and indirectly in political map which happened in our country. Nevertheless, on the side of the organization, NU as organization place for the elders who have said khithah as the struggle paradigm.

Kata Kunci: Teori Strukturasi Giddens, Pengorganisasian Kyai NU, Politik, dan Civil Society

PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai pengorganisasian kegiatan kyai NU dalam politik dan agenda pengembangan civil society di Kabupaten Pasuruan. Cakupan utama penelitian ini berhubungan dengan berbagai tindakan sosial yang dilakukan oleh para kyai NU dalam kedudukannya sebagai agen¹ yang secara teoritis dipahami sebagai memiliki kapasitas untuk bertindak secara kreatif dalam menghadapi struktur.²

¹ Peneliti meminjam istilah agen sebagaimana yang sering diungkapkan oleh Giddens, untuk menggambarkan peran vital sosok kyai dalam organisasi NU yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Di samping itu kyai juga berperan banyak dalam politik. (Lihat Horikoshi 1987: 245-246, dan Dhofier 1982: 2-7).

² Giddens menggunakan dua peristilahan yang dalam banyak penutur dan kepustakaan berbahasa Indonesia diterjemahkan dengan satu

Pengorganisasian kegiatan kyai NU dalam politik merupakan sebuah tindakan di mana pencapaian tujuan sebuah organisasi tidak saja ditetapkan sebagai hasil atas berbagai pilihan yang telah disediakan oleh struktur NU tetapi juga yang diciptakan sendiri oleh individu yang dipahami sebagai agen yang memiliki kapasitas untuk bertindak kreatif. Dalam studi ini, penetapan cara-cara pencapaian tujuan tidak saja dipahami sebagai reaksi individu atas struktur,

kata yang sama, yaitu agen untuk agent dan agency. Dalam Penelitian ini, saya membedakan kedua istilah itu; agen untuk agent, dan keagenan untuk agency. Sementara yang disebut pertama, yakni agen, lebih merujuk pada kata benda yang menggambarkan individu; yang disebut kedua, yakni keagenan, lebih merujuk kepada kata benda abstrak yang menggambarkan kemampuan untuk menghasilkan tindakan yang memproduksi, mereproduksi dan mentransformasikan struktur. Lihat: Ritzer dan Goodman (2004).

namun dapat juga timbul sebagai respon generatif dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Penekanan pada pola tindakan kreatif individu ini didasari oleh pemikiran utama Giddens tentang teori strukturasi yang menekankan pada tindakan aktif individu untuk memproduksi, mereproduksi, dan mentransformasikan struktur yang di satu pihak bersifat membatasi (*limiting*) dan di pihak lain membisakan (*enabling*).³

Dengan demikian, tindakan sosial dipahami sebagai hasil modifikasi yang kompleks yang mencerminkan pergumulan di antara tindakan (agen) dan sosialitas (struktur) dari pada semata-mata sebagai hasil determinisme struktur sebagaimana dipahami penganut aliran strukturalis Parsonian⁴, atau sebagai kontras yang dimengerti oleh penganut aliran interpretatif yang menempatkan penafsiran subjektif individu sebagai dasar dari sebuah tindakan sosial Sandstrom⁵. Ini berarti dalam

³ Kata "membisakan" dipakai dalam penelitian ini untuk menggantikan kata "enabling" yang dipakai Giddens dalam teori strukturasinya. Dalam praktek penterjemahan, khususnya dalam karya Giddens, kata "enabling" sering diterjemahkan dengan kata "memungkinkan". Peneliti secara sengaja memilih kata "membisakan" karena akar kata "able" dalam bahasa Indonesia berarti "bisa". Dari sanalah kata "membisakan" –walaupun mungkin kurang lazim ditemukan.

⁴ Holton, R., 2001, "Symbolic Interaction at the End of the Century", dalam Ritzer, G. and Smart, B., *Handbook of Social Theory*, London: Sage publications, Hal 3-7

⁵ Penganut aliran struktural fungsionalis yang dasar-dasar argumentasi utamanya diletakkan oleh Emile Durkheim (1938) dan Talcott Parsons (1937, 1951) berpandangan bahwa struktur merupakan faktor yang menentukan tindakan individu. Determinasi struktur, dengan kata lain merupakan inti penjelasan dari aliran struktural fungsional yang memahami tindakan individu sebagai representasi dari "naskah" (script) yang terdapat dalam struktur. Sebaliknya, aliran fenomenologis yang dikembangkan oleh Schutz (1972), Berger dan Luckman (1969) berpandangan bahwa tindakan bebas individu yang bersifat voluntaristiklah yang menghasilkan struktur. Teori strukturasi Giddens yang mendasari penelitian ini menolak dualisme yang saling berseberangan itu dengan menerima secara penuh bahwa tindakan adalah hasil dari dualitas di antara

setiap tindakan sosial, agen (kyai) berke-sanggupan untuk secara terus menerus berpikir tentang apa yang mereka lakukan dan mengevaluasi apakah tindakan-tindakan mereka bersesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai (*reflexive monitoring of action*).

Dengan kata lain, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa "bertindak" dalam konteks sosial sesungguhnya merupakan rangkaian tindakan yang melibatkan aturan-aturan (*rules*) dan sumber-sumber (*resources*) yang keduanya menjadi relevan hanya melalui tindakan sosial, dan yang dapat diubah atau dipelihara dalam kaitannya dengan struktur (*structures*) dan keagenan (*agency*) yang memiliki sifat dualitas. Karena itu, baik aturan-aturan maupun sumber-sumber bukanlah sesuatu yang terpisah dari tindakan agen.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada proses dialektika di antara struktur dan keagenan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tindakan sosial (*social action*) menciptakan struktur dan hanya melalui tindakan sosial sajalah struktur diproduksi dan direproduksi yang memungkinkan struktur dapat bertahan dari satu waktu ke waktu yang lain.

METODE PENELITIAN

Secara teoritik, pembedahan terhadap problema pengorganisasian kyai dalam politik dan agenda pengembangan civil society akan dikaji melalui paradigma pendekatan teori strukturasi Giddens. Penelitian ini mengaplikasikan dan sekaligus mengintegrasikan perspektif makro yang menekankan pentingnya peran struktur dan perspektif mikro yang memandang individu sebagai titik tolak untuk memahami sebuah tindakan sosial. Sementara secara metodologis, penelitian ini akan struktur dan keagenan. Uraian lebih mendalam tentang argumentasi-argumentasi utama dari teori strukturasi Giddens ini akan dibahas lebih jauh di dalam kerangka teori.

dihampiri dengan desain pendekatan kualitatif mengingat unit kajiannya adalah fenomena sosial yang dinamik. Perspektif kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini mengutamakan pada prinsip-prinsip berikut: pertama, informan diperlakukan sebagai individu yang berpartisipasi secara aktif dalam mengkonstruksikan realitas. Kedua, data dipahami sebagai hasil sebuah tindakan reflektif yang menempatkan teks dan konteks sebagai sebuah realitas yang saling berhubungan, dan yang ditemukan dalam dan melalui tindakan sosial para agen. Ketiga, mengutamakan proses penelitian yang memberi tempat penting bagi dialektika di antara perspektif makro-mikro, objektif subjektif, dan individual-kolektif. Keempat, perspektif informan adalah hal yang esensial dalam pengumpulan dan analisis data.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara seperti wawancara mendalam (in depth interview) yang tidak berstruktur. Selain itu penelitian ini juga menggunakan sumber/ bahan tertulis. Analisisnya dilakukan secara induktif dengan tahapan menghubungkan data, kategorisasi data, komparasi data, kesaling hubungan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Di samping itu penelitian ini juga akan menggunakan reflexive methodology.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Setting Lokasi Penelitian: Sebuah Gambaran Umum

Kabupaten Pasuruan adalah sebuah kawasan kabupaten yang terletak di bagian tengah wilayah Propinsi Jawa Timur. Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di utara, Kabupaten Probolinggo di timur, Kabupaten Malang di selatan, Kota Batu di barat daya, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah industri dan daerah wisata, termasuk Gunung Bromo.

Sedangkan posisi koordinatnya 112030' - 113030' BT dan 7030' - 8030' LS.

Luas wilayah seluruhnya mencapai 1.474 km² (147.401,50 Ha), dengan karakter topografi berbukit hingga pegunungan di sisi Barat dan Selatan serta merupakan dataran subur yang luas ke arah Timur. Daerah ini juga dikenal dengan sebutan kawasan Kabupaten Santri dengan tokoh agama yang sangat terkenal di Nusantara ini, terutama di kalangan Nahdhiyyin, yang hingga saat ini menjadi tempat kunjungan ziarah karena dianggap sebagai auliya' Allah, ulama itu adalah K.H. Hamid (Mbah Hamid Pasuruan).

Secara administratif, kabupaten Pasuruan terbagi menjadi 24 kecamatan, yaitu: Bangil, Beji, Gempol, Gondang Wetan, Grati, Kejayan, Kraton, Lekok, Lumbang, Nguling, Pandaan, Pasrepan, Pohjentrek, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Puspo, Rejoso, Rembang, Sukorejo, Tosari, Tutar, Winongan dan Wonorejo. Sedangkan jumlah desa/kelurahannya 341 desa, dengan kepadatan penduduk 1.190 jiwa/km². Bagian utara wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan dataran rendah. Bagian barat daya merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno dan Gunung Welirang. Bagian tenggara adalah bagian dari Pegunungan Tengger, dengan puncaknya Gunung Bromo.

Kabupaten Pasuruan memiliki keanekaragaman penduduk yang sebagian besar adalah suku Jawa, selain itu bisa juga ditemui suku-suku lain seperti suku Madura serta masyarakat keturunan Tionghoa-Indonesia, Arab dan India. Di Pasuruan ditemui juga satu suku dengan sosial budaya khas, yaitu masyarakat Tengger yang hidup di kawasan Pegunungan Tengger Kecamatan Tosari. Sistem sosial dan religi masyarakat Tengger ini sangat unik dan khas dengan berbagai aktivitasnya seperti

perayaan Hari Raya Kasada dan Hari Raya Karo yang di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai religius dan sejarah.

Dilihat dari konstruksi kehidupan sosialnya, Pasuruan merupakan kabupaten sangat heterogen, sehingga untuk memetakan pola-pola kehidupan sosial-budaya masyarakatnya secara etnografis tentu memiliki tingkat kesulitan. Hampir semua etnik di tanah air terdapat di Kabupaten Pasuruan. Sekalipun demikian, suku Jawa dan Madura merupakan etnis dominan di kabupaten ini, hidup berdampingan dengan etnis lain yang jumlahnya relatif lebih kecil seperti Cina, Arab, India, Batak, Bugis, Sunda dan lain-lain.

Dalam hal politik, Hampir setiap proses perpolitikan yang berlangsung di Kabupaten Pasuruan senantiasa diwarnai oleh ketegangan-ketegangan sosial dan politik. Terdapat banyak peristiwa yang dapat dicatat di antaranya adalah tragedi alas Tlogo, kasus pembunuhan dukun santet pada akhir 1997 dan awal 1998 di mana korban terornya kebanyakan kyai dan tokoh agama. Menurut pengamatan banyak pihak kasus teror dengan isu pembunuhan dukun santet tidak lebih sebagai kedok semata untuk menutupi hidden connection dari aksi perpolitikan praktis pemerintah pusat di tengah menguatnya eskalasi gerakan kritisisme kelompok Muslim tradisional dalam melakukan counter culture terhadap kemapanan pemerintahan Orde Baru.

Tragedi penurunan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan oleh MPR secara sinergis juga memunculkan ketegangan sosial dan politik dalam bentuk aksi massa yang secara simbolik ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap manuver politik para politisi di MPR. Dalam sorotan media, respon masyarakat Pasuruan yang diartikulasikan dalam aksi-aksi yang bersifat reaktif dan radikal seperti pembentukan

Pasukan Berani Mati (PBM) yang dipimpin oleh Gus Mujib dan Gus Suadi. Belum lagi, kasus kekalahan kaum santri tradisional yang dimotori PKB dalam memperjuangkan perebutan pemilihan Bupati Pasuruan periode 2008-2012 dengan calonnya K.H. Jusbakir al-Jufri, dan Juga Muzammil Syafi'i, yang memenangkan calon yang diusung partai PDIP, Dade Angga dan Eddy Paripurna.

Ketegangan sosial akibat perpolitikan hampir terjadi di setiap daerah termasuk di Pasuruan. Warga Pasuruan baru saja menghirup udara kebebasan politik setelah sekian lama terkungkung dalam sistem perpolitikan yang tertutup dan otoriter. Sebagaimana dirahklumi, sepanjang pemerintahan Orde Baru berkuasa selama 32 tahun lebih semua elemen masyarakat tidak dapat mengartikulasikan perpolitikannya secara bebas. Ancaman, tekanan, dan intimidasi politik sering diterima warga. Praksis, sepanjang pemerintahan Orde Baru, elemen masyarakat Pasuruan seolah tiarap di bawah tekanan represif politik pemerintah.

Seiring dengan jatuhnya rezim Orde Baru 1998, masyarakat Kabupaten Pasuruan mulai aktif kembali terlibat dan melibatkan diri dalam proses-proses perpolitikan. Kebebasan berpolitik dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat menjadi agen atau subyek politik bukan lagi obyek. Sebagai hasilnya, pesta demokrasi periode pemilu 1999 dan 2004; tidak lagi didominasi partai politik milik pemerintah (Golkar). Hasil pemilu memantapkan PKB, representasi parpol warga masyarakat Pasuruan yang mayoritas nahdliyin, sebagai parpol pemenang pemilu. Kemenangan PKB, otomatis dapat mengangkat kader-kader nahdliyin ke pentas kekuasaan. Di samping itu, parpol-parpol lain berhasil pula meloloskan kadernya untuk duduk dalam struktur kekuasaan seperti PAN, PNU, PKS dan PPP. Sinergi antara parpol

dan elemen civil society pada era reformasi ini akan berimplikasi strategis dan konstruktif terhadap penataan formasi sosial Kabupaten Pasuruan yang lebih humanis, demokratis, dan religius.

B. Pengorganisasian Kegiatan Sebagai Dualitas Struktur dan Keagenan

Dalam perspektif Giddens, kreativitas yang menjadi dasar dari kemampuan agen memodifikasi struktur pada dasarnya dikerangkai oleh tiga properti institusional: (1) skema interpretif (*interpretive schemes*) yang memberi kerangka dasar bagi interaksi yang bermakna; (2) sumber-sumber (*resources*) yang dialokasikan dan menjadi basis bagi kekuasaan individual (*individual power*) untuk bertindak; dan (3) aturan-aturan (*rules*) yang merupakan norma dan konvensi yang membatasi tindakan individu yang muncul dari pos-pos interaksi yang berulang⁶. Interaksi di antara agen dan ketiga modalitas inilah yang menjadi inti dari proses strukturalisasi⁷.

Sumbangan terpenting Giddens (1984) dalam memahami organisasi sebagai sebuah intitusi sosial terletak pada argumentasinya yang memandang bahwa tindakan manusia merupakan kondisi dan sekaligus dikondisikan secara terus menerus oleh properti institusional dalam sebuah konteks sosial. Karena itu, sebagai sebuah kerangka dialektika, sistem sosial dipahami dalam jaringan aksi yang saling mempengaruhi (*interdependent networks of actions*), dalam mana perubahan yang terjadi pada satu hal akan menghasilkan perubahan dalam hal yang lain⁸. Dengan kata lain, dualitas struktur menghasilkan satu keadaan, di mana aturan-aturan dan sumber-sumber yang dilibatkan dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial pada saat yang sama juga menjadi sarana dari sistem

reproduksi⁹.

Dari perspektif teori strukturalisasi, perubahan organisasional di tingkat kebijakan tentang penentuan prioritas merupakan hasil dari tindakan-tindakan individu yang berinteraksi dengan struktur yang meliputi aturan-aturan perundang-undangan, strategi organisasi, mekanisme dan protokol resmi. Di samping membatasi, struktur juga memberi peluang untuk bertindak. Walaupun demikian, kedua-duanya tidak dalam posisi menentukan sepenuhnya atas tindakan individu. Sementara itu, harus dicatat bahwa pilihan-pilihan yang tersedia tidaklah sepenuhnya bebas dari struktur.

Dengan demikian, interaksi individu dan struktur dapat mengambil bentuk-bentuk yang beragam: bergerak dari mempengaruhi (*influencing*) dan membentuk (*shaping*) ke arah interaksi yang bersifat memelihara (*maintaining*), memperkuat (*reinforcing*), mengubah (*changing*), bahkan menghancurkan (*destroying*). Hubungan di antara individu dan struktur yang mencerminkan dualitas struktur inilah yang menghasilkan argumentasi umum, bahwa perubahan organisasional yang berasal dari sebuah situasi yang mirip adalah tidak sepenuhnya dapat diprediksi¹⁰.

C. Paradigma Politik Kyai: Idealitas Khittah dan Syahwat Politik

Kajian-kajian tentang kyai memperlihatkan kelebihan luar biasa yang dimiliki sosok kyai. Lazimnya, kyai merupakan gelar yang disandang oleh seseorang yang mempunyai kelebihan di bidang ilmu-ilmu hukum (Fiqh, Tauhid dan Tasawwuf). dalam agama Islam. Mereka mempunyai peran yang esensial dalam masyarakat. Di samping itu keberadaan kyai dalam masyarakat

⁶ Pozzebon and Pinsonneault, 2001: 206.

⁷ Stein, 1996.

⁸ Holmer-Nadesan, 199

⁹ Giddens, A., 1977, *Studies in Social and Political Theory*. London: Hutchinson, Hal 19.

¹⁰ Pozzebon and Pinsonneault, 2001, hal 206-207.

mendominasi pengaruh kultural.

Setidaknya ada tiga faktor penting mengapa keberadaan kyai di masyarakat terasa penting. Pertama, tingginya derajat mobilitas kyai dalam membangun jaringan dengan komunitas di luarnya, baik sesama kyai ataupun jaringan tertentu lainnya, sehingga memungkinkan mereka memperoleh informasi baru yang dimiliki para santri dan masyarakat sekitarnya.

Kedua, posisi sentral dan ketokohan kyai di desa dan di pesantrennya, menjadikan mereka sebagai sumber rujukan bagi orang dari luar desa, di mana orang-orang yang datang ke desa tak bisa mengabaikan eksistensi dan peran kyai. Ketiga, sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari posisinya, kyai biasanya memiliki kelebihan yang bersifat material dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, termasuk memiliki akses informasi yang lebih baik. Dalam optik akademik, istilah kyai untuk pertama kalinya diperkenalkan Geertz pada tahun 1960 dalam kerangka studi antropologi untuk mewakili sosok ahli agama. Sedangkan Horikoshi secara konsisten membedakan penggunaan istilah kyai dari ulama karena fungsi formal yang diperankannya. Ulama lebih memerankan fungsi-fungsi administratif, sedangkan kyai cenderung bermain pada tataran kultural.

Menurut Miftah Farid, perbedaan perilaku sosial politik kyai, dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dua faktor. Pertama, faktor posisi sosial kyai yang menurut studi-studi terdahulu memperlihatkan adanya suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Studi yang dilakukan Horikoshi¹¹, misalnya, menunjukkan kekuatan kyai sebagai sumber perubahan sosial, bukan raja pada masyarakat pesantren tapi juga pada masyarakat di sekitarnya.

¹¹Horikoshi, Hiroko, 1976, "A Traditional Leader in a Time of Change: The Kyai and Ulama in West Java". Disertasi Doktor, University of Illinois.

va. Sementara Greetz¹² menunjukkan kyai sebagai makelar budaya (*cultural brokers*) dan menyatakan bahwa pengaruh kyai terletak pada pelaksanaan fungsi makelar ini.

Kedua, faktor kekuatan personal yang diwarnai oleh pemikiran teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya. Sebagai sosok yang diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik di tengah-tengah masyarakatnya, kyai dipandang memiliki kemampuan "luar biasa" untuk menggerakkan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Dia bukan politisi, tapi kalkulasi politiknya yang dianggap "fatwa" politik yang terakhir untuk diikuti. Kasus Gus Dur yang tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden RI. ketika itu, seperti diketahui banyak kalangan, sebetulnya karena "nasihat-nasihat" kyai yang mendorong untuk mengambil keputusan seperti itu. Hubungan kausalitas antara kedua faktor inilah yang kemudian dielaborasi secara kritis dalam penelitian ini. Penelitian perselingkuhan kyai dan kekuasaan yang dilakukan Endang Turmudi sangat aktual untuk memotret peran politik kyai di era reformasi ini. Buku yang meneropong pasang surut perpolitikan kyai ini dapat menjadi bahan rujukan untuk melihat peran kyai dalam pemilu mendatang. Kendati hanya meneliti peran kyai di Jombang, Jawa Timur, namun diyakini hasilnya adalah representasi dari peran kyai Nahdlatul Ulama di daerah-daerah lain.

Peran kyai dalam kancah politik nasional sempat menyusut sejak NU mengeluarkan kebijakan "kembali ke khittah". Namun, sebagian kalangan menyebut, penyebab kyai mundur dari ruang politik sebenarnya akibat para kyai tergusur dari PPP, saat partai itu dipimpin J. Naro. Namun,

¹² Greetz, C., 1961. *The Religion of Java*. Glencoe: The Free Press.

seiring reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto, peran politik kyai kembali terbuka. Ini bisa ditandai dengan munculnya PKB yang disokong penuh kyai NU. Mencoloknya perolehan suara PKB dalam Pemilu 2004 misalnya dapat juga menandai kebangkitan kyai NU. Bahkan suara PKB secara nasional 60 persennya dipasok dari Jawa Timur yang menjadi basis kaum nahdhiyin.

Dari perspektif pemerintah, kekuasaan kyai cukup kuat untuk mempengaruhi tindakan sosial-politik masyarakat. Hal ini karena para kyai adalah pemegang legitimasi keagamaan. Legitimasi kyai ini oleh pemerintah atau para elite politik dapat digunakan untuk melegalkan tindakan-tindakan duniawi mereka¹³.

Otoritas kyai tak selamanya langgeng. Tak sedikit kyai yang otoritasnya hancur akibat berselingkuh dengan penguasa atau memang mabuk kekuasaan. Pada saat umat sudah tak percaya lagi dengan otoritas kyai, saat itu juga umat secara perlahan akan meninggalkannya. Kasus ini banyak terjadi pada zaman Orde Baru. Ketika kyai berbondong-bondong masuk Golkar, umat tidak otomatis ikut, mereka bahkan malah menjauhi sang kyai.

Endang Turmudi¹⁴ berpendapat, perselingkuhan kyai dengan penguasa tak akan menghilangkan peran dan otoritas kyai secara keseluruhan. Kyai sebagai penjaga moral dan nilai-nilai masih relevan dan berjangka panjang. Sebab pada dasarnya kyai dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu kyai pesantren, kyai tarekat, dan kyai yang terlibat dalam politik. Jenis kyai yang terakhir inilah sebenarnya yang rawan berselingkuh dengan penguasa dan mabuk kekuasaan.

¹³ Wawancara dengan K.H. Abdurrahman Syakur 24 Maret 2009.

¹⁴ Turmudi, Endang, 2004, *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS, hal 264.

Deskripsi di atas menggambarkan bahwa kyai sebenarnya tidak akan pernah terlepas dari politik. Begitu juga dengan hasil penelitian penulis ini. NU yang menjadi sentral dari organisasi para kyai menjadi media penelitian sejauh mana kyai berpersepsi tentang keterlibatan kyai dengan politik kekuasaan.

Pandangan tentang hubungan NU dan politik sesungguhnya bagai pinang dibelah dua, keduanya tidak dapat dipisahkan. Mayoritas kyai menyatakan bahwa NU dan politik adalah dua entitas yang tidak bersifat diametral, keduanya berhubungan satu sama lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh K.H. Su'ud Ibrahim (Mantan Ketua Tanfidh PKB), bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari kehidupan politik karena manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*). Begitu juga NU, sebagai organisasi yang memiliki massa besar, NU tidak bisa menghindari dari kehidupan politik. Hanya saja, politik NU haruslah politik kebangsaan bukan politik praktis yang sibuk memperebutkan kekuasaan. NU sebagai jam'iyah ijtima'iyah diniyyah harus menjadi rahmatan lil alamin, sekaligus kontrol bagi kehidupan politik¹⁵.

Senada dengan K.H. Su'ud, K.H. Ahmad Subadar mengungkapkan jika warga NU bersikap apolitik maka Indonesia bisa hancur. Kyai Subadar mencontohkan pada pemilu 2004 silam dan 2009 ini, jika warga NU tidak ikut berpartisipasi maka tatanan demokrasi yang diinginkan bangsa Indonesia tidak akan terwujud. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kyai Su'ud, Kyai Subadar juga menggarisbawahi bahwa yang dimaksud politik dalam konteks hubungannya dengan NU bukan politik kekuasaan melainkan politik partisipatoris, yaitu politik di mana NU juga berperan aktif dalam membangun bangsa

¹⁵ Wawancara, tanggal 25 Maret 2009

dan negara (*civil Society*)¹⁶.

Pendapat-pendapat di atas hampir sama dengan yang dipaparkan oleh semua kyai, peneliti tidak mendapatkan perbedaan pandangan dari para kyai yang menjadi informan. Peneliti mendapatkan pengembangan informasi di atas dari Gus Mujib (Pengasuh Pondok Pesantren al-Yasini Areng-Areng), beliau secara gamblang memberikan argumentasi mengapa NU tidak dapat dipisahkan dengan hiruk pikuk politik, beliau mengatakan:

Saya kira ini karena NU sendiri kan lahir pada saat situasi politik sedang panas. Ketika perang dunia I selesai tahun 1918, di dalam negeri pergerakan kemerdekaan mulai tumbuh. Dan ini memang sudah dimulai sejak awal abad XX yang kita sebut sebagai awal kebangkitan nasional. Tahun 1905 SDI (Serikat Dagang Islam) lahir; tahun 1908 Budi Oetomo lahir; tahun 1912 Muhammadiyah lahir, 1914 ISD yang dipelopori oleh orang-orang Belanda yang berpaham kiri juga muncul, bahkan akhirnya organisasi ini terse-ret ke dalam PKI pada tahun 1920. Kemudian tahun 1924 PKI memberontak. Pemberontakan yang tidak matang itu, akhirnya merugikan proses perjuangan kemerdekaan. Nah, tahun 1926 NU lahir. Antara tahun 1924-1926 itu, di samping orang-orang pergerakan, banyak kyai dan santri yang ditangkap Belanda dengan tuduhan komunis. Ada yang mencari-cari, apakah kelahiran NU tersebut tidak ada hubungannya dengan upaya menyelamatkan kyai-kyai yang baru ditangkap Belanda. Saya sendiri belum bisa memastikan, ini kan urusannya ahli sejarah. Terus pada tahun 1927 Bung Karno mendirikan PNI. Tahun 1928 ada Kongres pemuda, yang menurut saya, ini pantas disebut se-

¹⁶ Wawancara, tanggal 04 Mei 2009.

bagai hari kelahiran bangsa Indonesia. Tahun 1931 PNI-nya Bung Karno dibubarkan, kemudian dibentuk Partindo (Partai Indonesia Raya) yang dipimpin oleh Sartono. Sebagian anggota PNI yang tidak setuju dengan pembentukan Partindo, kemudian meneruskan nama PNI tetapi dengan singkatan lain, Pendidikan Nasional Indonesia atau yang disebut dengan PNI Baru. Tahun 1936 Boedi Oetomo bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PRI). Dan seterusnya...."¹⁷.

Lebih lanjut Gus Mujib menjelaskan, bahwa sejak kelahirannya, NU selalu ditarik-tarik ke dalam siklus politik praktis, sehingga meskipun bukan organisasi politik, NU termasuk bagian dari makhluk politik yang tidak bisa lepas dari politik.

Jika Gus Mujib melihat keterlibatan NU dalam politik disebabkan NU mempunyai massa besar, tidak demikian dengan Kyai Sholeh Bahrudin, yang mengartikan bahwa NU menjadikan politik hanya sebagai instrumen untuk mencapai tujuan NU. Sebagaimana pendidikan, dakwah, ekonomi, dan lainnya, politik juga merupakan sarana mengefektifkan visi dan misi organisasi. Politik dalam konteks NU bukan upaya mendapatkan kekuasaan atau hanya demi kepentingan yang oportunistik. Mengenai hal ini, Kyai Sholeh menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

NU tidak main politik praktis, namun kalau NU memperjuangkan agama ini menggunakan instrumen politik, ini tidak salah? Artinya NU harus tidak anti politik. Apakah politik kebangsaan, kerakyatan atau juga politik kekuasaan, asalkan kekuasaan yang ada dapat dijadikan instrumen bukan tujuan¹⁸.

¹⁷ Wawancara, tanggal 20 April 2009

¹⁸ Wawancara, tanggal 9 Mei 2009

Dari beberapa pandangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pertama, NU tetap tidak bisa lepas dari politik, akan tetapi politik dalam perspektif NU adalah politik kebangsaan dan partisipatoris. Kedua, dengan massa yang besar NU tidak mudah memisahkannya dengan politik, termasuk politik praktis. Ketiga, NU menjadikan politik sebagai instrumen dalam mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Di sinilah para kyai sebenarnya sering melakukan tindakan-tindakan akrobatik, berlawanan dengan keputusan struktural organisasi.

Akan tetapi menurut penulis, seperti yang dikatakan K.H. Sholeh, bahwa yang harus menjadi perhatian utama dari politik kyai adalah pertama, disadari atau tidak, kyai-kyai NU telah sangat terlibat dalam upaya dukung-mendukung capres, Pilgub, Pilbub. Memang, keterlibatan kyai dalam momen-momen politik bukanlah hal baru. Sejak masa-masa awal kemerdekaan komunitas kyai senantiasa terlibat dalam berbagai peristiwa politik. Namun, keterlibatan tersebut tidak bersifat monopolistik. Namun, hal yang paling mengerikan adalah kalau terjadi "perselingkuhan" antara pemegang kekuasaan dengan kyai.

Kedua, komunitas kyai sebagai modal sosial NU yang tidak dimiliki komunitas lain, seharusnya ditempatkan (menempatkan diri) sebagai subyek, bukan sebagai obyek. Mereka dibutuhkan hanya pada saat-saat politisi membutuhkan dukungan. Setelah itu, kyai kembali dipandang sebagai komunitas tradisional tiada guna.

Ketiga, kyai NU harus radar betul bahwa apa pun sikap politik mereka akan membawa dampak terhadap masyarakat NU yang masih memandang kyai sebagai panutan, bukan hanya dalam urusan keagamaan tapi juga dalam hal sikap politik. Oleh karena itu, kearifan kyai NU dalam membentuk sikap politik warganya juga harus diikuti oleh kesadaran akan dampak sikap tersebut.

D. Hubungan NU dengan PKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus diakui sebagai refleksi dari politik kyai. Para deklarator PKB merupakan para kyai yang memiliki otoritas tertinggi di jagad NU. Akan tetapi tidak semua kyai satu komitmen bahwa PKB adalah partainya warga NU yang berakibat kepada wajibnya warga NU menyalurkan aspirasinya ke PKB.

Setidaknya ada tiga polarisasi pendapat kyai tentang hubungan NU dengan PKB. Pertama, anggapan bahwa NU harus mendukung dan mengharuskan warganya untuk mencoblos PKB. Kedua, bahwa NU secara institusi tidak bisa mengharuskan NU untuk mendukung PKB akan tetapi hanya cukup menyerukan atau menghimbau kepada warga NU dalam mendukung PKB. Ketiga, bahwa secara struktural tidak ada hubungan sama sekali dengan PKB.

Kelompok pertama ini diasumsikan oleh Kyai Mujtaba, beliau sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Menurut beliau, PKB merupakan anak tunggal NU dan dilahirkan oleh NU, jadi sangat wajar jika warga NU diharuskan untuk memilih PKB sebagai tempat penyaluran aspirasi politiknya. Kyai Mujtaba mengatakan:

PKB itu dilahirkan NU, jadi seperti anak dengan ibu yang tidak bisa dipisahkan. Dan lagi NU dan PKB itu diibaratkan sebagai suami istri. Dalam rumah tangga suami istri harus bekerja sama, jangan sampai bermusuhan, kalau bermusuhan nanti bisa cerai. Jadi saya menyalahkan orang NU yang tidak memilih PKB. PPP bukan miliknya NU, PPP itu miliknya orang Masyumi, apalagi Golkar. Iya kalau pada masa Soeharto NU tidak memiliki partai sendiri¹⁹.

¹⁹ Wawancara, tanggal 15 April 2009.

Dari pendapat Kyai Mujtaba ini, tampaknya Kyai Mujtaba mengecam warga NU yang tidak memilih PKB sebagai tempat penyaluran aspirasi politiknya. Pengecaman ini bukan tidak beralasan, sebab menurut beliau PKB merupakan kekuatan politik NU, sehingga harus didukung penuh oleh warganya. Lebih lanjut Kyai Mujtaba mengatakan:

PKB itu kekuatan NU, urusan politik ya berikan kepada PKB, tidak boleh orang NU yang menjadi pengurus NU mencalonkan Bupati atau Presiden. Jadi kalau mau mencalonkan, ya jadi perngurus PKB saja. Dulu seperti Pak Hasyim, sesungguhnya Pak Hasyim itu tidak boleh mencalonkan menjadi Presiden kalau tidak dari PKB, kemudian bagaimana jika kalah kembali lagi menjadi ketua NU, Mukhtamar kemarin itu penuh rekayasa oleh orang NU sendiri²⁰.

Dari pemaparan Kyai Mujtaba di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kyai Mujtaba menghendaki ada pembagian yang jelas antara kerja NU dengan PKB, sehingga tidak terjadi saling rebutan lahan. Saat penulis melakukan cross check ke orang dekat beliau, Yusrin Ilyas, ternyata Kyai Mujtaba amat getol mengkampanyekan PKB kapan pun dan di mana pun; di pengajian, acara peletakan batu pertama Masjid, istighosah maupun pada acara lainnya. Masih menurut Yusrin, Kyai Mujtaba selalu marah pada santri beliau yang tidak ikut berjuang membela PKB²¹.

Pendapat kedua berpandangan bahwa hubungan antara NU dengan PKB hanya bersifat historis dan emosional. Dengan demikian warga NU diharapkan memilih partai yang mempunyai hubungan secara historis dengan NU. Pendapat ini

diutarakan oleh kyai Subadar Pasuruan. Menurut beliau, PKB dalam kelahirannya dibidani secara langsung oleh NU, jadi sangat wajar jika warga NU secara emosional merasa ada ikatan batin dengan PKB. Ketika Orde Reformasi dibuka, mayoritas nahdliyin menghendaki agar PBNU membuat partai sendiri sebagai wadah aspirasi warga NU, sehingga saat itu PBNU mengintruksikan kepada lima kyai untuk menyiapkan kelahiran partai NU tersebut²²sebelum beliau aktif di PKNU). Akan tetapi dengan alasan bahwa PKB sudah tidak bisa memperjuangkan kemaslahatan umat NU, PKB sudah rusak secara etika politik. Maka dengan berpegang pada kemashlahatan ummat ia menjadi pelopor berdirinya PKNU.

Kyai Mujib juga berpendapat demikian, ia menghendaki PKB menjadi partai yang independen, dalam arti tidak memiliki hubungan lagi dengan NU. Tetapi ketika dikonfirmasi kepada teman dekatnya Gus Ali Zen, ternyata Kyai Mujib memiliki kecenderungan persepsi yang lama seperti Kyai Subadar. Kyai Ali Zen menyatakan, bahwa Kyai Mujib sering berbicara tentang hubungan NU dengan PKB. Kyai Mujib menghendaki PKB menjadi partai besar yang tidak selalu bergantung kepada NU, tak lupa Kyai Mujib berharap PKB mampu mengemban amanat warga NU yang telah memilih PKB sebagai partai pilihan mereka²³.

Dengan melihat perjalanan politik PKB yang dinilai gagal oleh Gus Mujib, ia pun dengan berpedoman pada prinsip dasar politik *ahlussunnah wal jamaa'ah* yang selalu mementingkan kepentingan umat dari pada kepentingan individu, maka Gus Mujib pun akhirnya bergabung dengan PKNU sebagai wadah untuk menyalurkan tujuan politiknya²⁴.

²⁰ Wawancara, tanggal 15 April 2009

²¹ Wawancara dengan Yusrin Ilyas, tanggal 25 Mei 2009

²² Wawancara, tanggal 18 Mei 2005

²³ Wawancara, tanggal 26 Mei 2009

²⁴ Wawancara, tanggal 20 April 2009

Senada dengan Kyai Mujib, K.H. Khoiron Syakur juga berpandangan jika PKB terus-menerus ngendon di NU, maka PKB tidak akan pernah menjadi partai besar. PKB diidealkan menjadi partai yang tidak hanya milik warga NU saja, namun milik bangsa Indonesia, sehingga dalam AD/ART, partai ini pun berasaskan Pancasila, bukan berasaskan Islam²⁵.

Pendapat ketiga menyatakan, bahwa NU dengan PKB secara struktur tidak ada hubungan apa pun. Secara historis berdirinya PKB memang difasilitasi oleh NU, sebagaimana PPP yang berdirinya juga tidak lepas dari campur tangan NU. Dengan demikian tidaklah adil jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saja yang disebut memiliki hubungan historis dengan NU. Padahal secara emosional warga NU juga terikat dengan beberapa partai yang berdiri pada waktu Orde Baru seperti, Golkar dan PDI-P, maupun partai yang lahir di Era Reformasi seperti PKU, PNU dan Partai SUNI dan juga PKNU. Jadi sebenarnya partai yang memiliki ikatan emosional dengan NU tidak hanya PKB saja, sebab sejak dulu NU memang tidak ke mana-mana, tapi berada di mana-mana. Pendapat ini diutarakan oleh Kyai Sholeh Bahrudin yang mengatakan sebagai berikut:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ya urusannya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mereka punya rumah tangga sendiri, sedangkan NU ya urusannya NU sendiri. NU kan sama dengan tentara, semua orangnya disebar ke mana-mana. Saya kira kita harus bisa berpikir lebih dewasa. Menurut saya, kami ingin mengajak dewasa semua warga NU marilah kita berkiprah min abwaabin mutafarriqah, dari pintu yang bermacam-macam. Mestinya begitulah di antara kita agar tidak saling jealous. Sebenarnya kalau Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) yang berbasis NU itu bisa bermain politik cantik, proporsional dan profesional itu akan bagus, tidak akan muncul PKNU dan lainnya. Ingat NU itu rumah kita, dan partai politik itu kendaraan kita. Jangan di samakan²⁶.

Namun demikian K.H. Sholeh menolak jika ada pendapat yang menyatakan bahwa NU tidak ada hubungan sama sekali dengan PKB. Menurutnya, sudah ada agenda rutin silaturahmi antara NU dengan PKB. Rapat tersebut diadakan, di samping agar terjadi hubungan baik antara keduanya juga terjadi saling tukar informasi.

Dari ketiga pandangan tersebut, nyatalah bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara para kyai mengenai hal ikhwah hubungan NU dengan PKB. Sebenarnya pendapat-pendapat itu menampilkan karakteristik-karakteristik dari masing-masing kyai NU. Perbedaan persepsi ini, sering diikuti oleh tindakan-tindakan praktis para kyai sesuai dengan logika berfikir mereka dalam bertindak, dengan tujuan yang sama yaitu kemashlahatan ummat.

E. Pola Hubungan Ideal antara NU dengan Politik

Idealisme terkadang dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak pernah ada, ia hanya ada dalam dunia mimpi yang maya dan abstrak. Sesuatu yang diinginkan tidaklah mudah untuk dicapai, melainkan harus melalui tahapan sulit, dan di situlah letak rintangan saat menuju pada pencapaian cita-cita yang diidealkan. Namun, ketika terbentur realitas, ada kalanya sebuah idealisme hilang dan menjadi sesuatu yang utopis.

Demikian juga dengan NU, sejak organisasi ini berdiri, selalu terjadi dialektika sejarah dan proses mencoba (*trial and error*) dalam relasinya dengan kekuasaan.

²⁵ Wawancara, tanggal 01 Juni 2009

²⁶ Wawancara, tanggal 3 Juni 2009.

Para pendiri NU selalu mengalami pancaroba, begitu pula dengan generasi selanjutnya. Pada awal mula didirikan, NU menjadi organisasi keagamaan yang konsisten dengan garis perjuangannya sebagai organisasi non-politik, meskipun dalam proses dialektika sejarahnya NU kemudian bermetamorfosa menjadi sebuah partai politik yang pada akhirnya kembali ke tujuan semula, yaitu sebagai Jam'iyah Ijtima'iyah Diniyyah. Dari situlah format ideal NU *Vis a Vis* politik kekuasaan acapkali menjadi perdebatan, baik di internal NU sendiri maupun dari pihak eksternal yang acapkali menempatkan diri sebagai pengamat dan pemerhati NU.

Kyai Sholeh mengatakan sebagai berikut:

Sebenarnya menurut saya, sejak 1984 sampai sekarang kan tidak ada perubahan, hanya tingkat intensitas dan frekuensinya saja yang berbeda, khususnya ketika bersinggungan dengan politik yang kalau boleh saya katakan seperti gelombang. Ketika tahun 1984 kita benar-benar khittah murni, yang membawa konsentrasi kita kepada dakwah, pendidikan, dan sosial. Ketika itu kita lumayan dapat berjalan optimal karena peran-peran politik NU dan warganya ketika Orde Baru tidak dapat peluang dan betapa peran politik NU demikian termarginalisasi. Ketika pak Harto lengser dan ada peluang bahkan NU mencoba memposisikan politik sebagai bagian dari instrumen untuk memperjuangkan agama, itu sebenarnya juga merupakan bentuk eksprimen yang tidak serta merta salah. Hanya, kadang tidak merasa hubungan antara agama dan politik mengakibatkan agama dijadikan hanya sebagai instrumen sedangkan politik sebagai tujuan²⁷.

²⁷ Wawancara, tanggal 03 Juni 2009.

Pendapat Kyai Sholeh di atas menggambarkan secara periodik bagaimana pola hubungan NU dengan politik. Banyak yang mengakui jika NU sudah bersinggungan dengan kepentingan politik, maka NU akan merasa sulit dalam mencapai tujuan awalnya. Oleh karena itu tugas NU adalah sebagai wadah pemberdayaan umat, meskipun di satu sisi NU haruslah ditopang dengan politik sebagai pemberi akses dalam pengambilan kebijakan (policy). Dalam posisi seperti ini, hubungan NU dengan politik haruslah demi kemaslahatan warga NU.

Kyai Syaifullah Damanhuri menilai bahwa pola hubungan ideal NU dengan politik adalah bahwa NU tidak berpihak pada salah satu partai. Dengan kata lain, NU haruslah menjaga jarak dengan semua partai politik, tak terkecuali dengan partai yang memiliki hubungan historis dengannya. Adapun kiprah NU adalah sebagai gerakan moral yang mampu mengontrol kehidupan politik, bukan ikut cawe-cawe mengurus partai politik²⁸.

Sedangkan Kyai Mujib berharap NU ke depan selalu dapat mengemban misi ummat. Menyangkut format hubungan NU dengan politik, NU berkewajiban menjaga moral dari politisi-politisi NU, warga NU yang aktif di parpol jangan menggunakan institusi NU sebagai kendaraan politik, sehingga NU tidak terus terjebak dalam permainan elit-elitnya. Sebagai gerakan moral, kiprah NU tidak harus berada dalam partai politik, NU bisa memberikan sumbangsih dalam membangun bangsa dan negara juga civil society²⁹.

F. Konstruksi Politik Kyai: Pemaknaan Khittah NU 1926

Khittah 1926 NU akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Khittah merupakan garis dan landasan perjuangan NU.

²⁸ Wawancara, tanggal 27 Juni 2009.

²⁹ Wawancara, tanggal 28 Mei 2009.

Sejak ditetapkannya keputusan kembali ke khittah 1926 pada Mukhtar NU ke-28 di Situbondo pada 1984, pemaknaan atas khittah selalu menjadi polemik. Bahkan dalam perkembangan sejarah NU, terjadi pemetaan mengenai makna khittah sendiri, sehingga secara khusus penulis meneliti pula tentang pemaknaan khittah 1926 dalam perspektif para kyai yang hasilnya beragam dan fantastis. Banyak kyai memaknai khittah sesuai dengan kepentingan politiknya, tapi tidak sedikit pula yang konsisten dengan pemaknaan khittah 1926 sesuai keputusan Mukhtar 1984.

K.H. Sholeh Bahrudin melihat kalau khittah cenderung hanya ditafsirkan bahwa NU tidak lagi terikat dengan parpol mana pun. Pada saat itu, NU memutuskan keluar dari PPP sehingga banyak beranggapan bahwa khittah NU adalah ketika NU keluar partai tersebut, padahal tidak demikian. Kyai Sholeh mengatakan:

Khittah itu tidak sekedar dimaknai dengan keluarnya NU dari PPP atau dari parpol tertentu. Yang disebut khittah itu muatannya jauh lebih dalam, khittah itu menerangkan NU sepenuhnya, seutuhnya mulai dari sejarahnya, motivasi didirikannya, dasar keagamaannya, tentang kemasyarakatannya secara komplit. Tetapi pada umumnya bahwa yang dinamakan khittah itu adalah NU tidak terikat dengan partai. Kata-kata tidak terikat itu kemudian ditafsiri macam-macam dan nggak karuan, malah NU sendiri tidak sempat membuat tafsiran³⁰.

Dalam kesempatan lain Kyai Sholeh juga mengatakan sebagai berikut:

Sesungguhnya khittah NU (yang biasanya dijadikan dalil atau dalih) melarang mendukung atau berkampanye untuk salah satu calon, pengaturannya sederhana saja, yaitu NU sebagai

jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan parpol ataupun ormas mana pun. Tidak terikat artinya independen, bebas, mandiri. Akan tetapi tidak terikat tidak harus diartikan takut dekat dengan sana dengan sini. Tidak terikat juga tidak harus diartikan dibiarkan tanpa arah³¹.

Masih menurut Kyai Sholeh, saat ini setidaknya ada tiga penafsiran tentang khittah. Pertama, khittah ala pengurus PKB yang menafsirkan bahwa NU tidak lagi terikat dengan parpol mana pun, tetapi warga NU diharapkan memperhatikan dan mendukung partai yang berdirinya difasilitasi oleh NU. Kedua, penafsiran khittah ala pengurus NU yang memandang bahwa makna khittah adalah warga NU bebas menyalurkan aspirasi politiknya. Ketiga, khittah ala kyai kultural NU, yang memaknai khittah sesuai yang telah digariskan pada mukhtar.

Statemen Kyai Sholeh mengenai khittah ini mendapatkan pembenaran dari kyai lain, seperti yang dikatakan oleh Kyai Nawawi. Beliau memaknai khittah sebagai satu seruan bagi warga NU untuk mendukung PKB.

(Khittah itu ada semasa Golkar, sehingga NU keluar dari PPP, sekarang karena NU tidak seperti dulu, maka yang namanya khittah yaitu warga NU harus kembali kepada PKB yang secara nyata dilahirkan oleh NU)³².

Menurut penulis, maksud Kyai Nawawi di atas adalah, latar belakang lahirnya keputusan NU untuk kembali ke khittah merupakan suatu keputusan yang dilandasi kekecewaan terhadap PPP yang selalu merugikan NU. Di samping alasan tersebut, pada saat itu NU juga didesak oleh penguasa untuk tidak lagi ikut campur dalam urusan politik praktis, sehingga

³¹ Wawancara, tanggal 12 Juni 2009.

³² Wawancara, tanggal 1 Juli 2009.

Kyai Nawawi seolah beranggapan Golkar-lah yang menjadikan NU kembali ke khittah karena Golkar.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Gus Suadi, Khittah dalam pandangannya merupakan "garis berfikir NU" baik secara personal maupun organistoris. Dengan demikian khittah inilah yang membatasi hubungan NU dengan politik. Jika NU terus terjebak pada permainan politik praktis, maka akan kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, orientasi pergerakan NU perlu diluruskan ke jalan yang sesuai dengan tujuan awal berdirinya. Meskipun dengan keputusan seperti ini, NU bukan berarti bersikap apolitis, melainkan NU turut serta membangun insan berbudi luhur dan Islami³³.

Oleh karena itu, para politisi NU haruslah menjaga amanat dan meningkatkan pelayanan kepada ummat dengan mencukupi kebutuhan sandang, papan, pangan serta pendidikan dan kesehatan maupun kebutuhan vital lainnya. Kalau kondisinya terbalik, maka tidak ada gunanya mereka memiliki jabatan politisi tersebut. Jadi, dalam pandangannya, jangan sampai terjadi, para politisi NU itu justru menjadi pekerja politik (*politic worker*) apalagi niat nyambut gawe.

Dalam pandangan Giddens, karena kebebasan seorang kyai sebagai agen yang mempunyai kapasitas untuk bertindak itulah, sehingga ia mampu bertindak akrobatik di tengah-tengah perselisihan pandangan politik antar kyai di NU. Hampir semua pandangan dan tindakan akrobatik kyai-kyai politik NU yang berbeda dan keluar dari aturan main Khittah NU sebagai organisasi, menjadikan mashlahah 'amamah menjadi alasan dan tujuan tindakan politik mereka. Mereka ingin membangun politik yang santun berdasarkan ahlussunnah wal jama'ah, dalam rangka ikut

membangun civil society khususnya di Kabupaten Pasuruan.

Bagi organisasi NU, tindakan-tindakan akrobatik para kyai itu masih dapat ditoleransi, apabila mereka masih bepegang teguh pada prinsip dasar etika politik NU yang selalu menjunjung tinggi prinsip kebangsaan dan kerakyatan.

KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian institusi adalah hasil tindakan kolektif para agen atas berbagai pilihan strategic yang merupakan fungsi dari dialektika di antara struktur dan keagenan, dan di antara kendala dan peluang. Selain itu, kapasitas transformatif adalah sesuatu yang inheren dalam keagenan yang menyebabkan sebuah kemungkinan relatif tanpa batas akan potensi untuk menghasilkan tindakan. Dengan demikian, struktur bukan dan tidak pernah menjadi penentu (*predictor*) dari sebuah tindakan. Kompleksitas dualitas di antara kendala (*constraints*) dan peluang (*opportunities*)-dengan kata lain, di antara struktur dan keagenan-terletak pada kapasitas transformatif yang melekat pada agen yang akibat-akibatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Penelitian ini juga menyimpulkan, para Kyai Politik di lapangan mengoperasikan otonomi yang relatif besar dalam proses memahami politik. Sehingga kemudian memunculkan tindakan-tindakan akrobatik. Kapasitas untuk mengoperasikan dan mempertahankan sejumlah otonomi itu didasarkan oleh beberapa faktor yang saling memperkuat eksistensi otonomi itu: kewenangan yang diberikan oleh aturan organisasi tidak bersifat linear, dan seluruh kompleksitas dualitas di antara struktur dan keagenan.

Di samping aturan dan sumber-sumber, skema interpretatif memberikan

³³ Wawancara, Tanggal 29 Juni 2009.

dasar yang penting terhadap mana sebuah tindakan sosial para agen diorientasikan pada tujuan yang relevan dalam kerangka makna yang khusus yang relevan dengan berbagai standar nilai dan pengetahuan yang berkembang dalam Organisasi NU. Dengan kata lain, skema interpretatif menyediakan sebuah landasan berikut parameternya yang dapat dipakai oleh agen sebagai dasar untuk melakukan penafsiran terhadap sebuah tindakan dan atau peristiwa secara bermakna dalam rangka menciptakan kemashlahatan umat (*Civil Society*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin., 1999. *Agama, Kebenaran, dan Relativitas (Sebuah Pengantar)*. Dalam Gregory Baum *Agama dalam Bayang-bayang Relativisme Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis-Normatif*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Bekerjasama dengan Siprus.
- Archer, M.S, 1982a, 'Morphogenesis versus Structure and Action; British Journal of Sociology, Vol. 33 No.4.
-, 1982b, 'Human Agency and Social Structure: A Critique of Giddens ; dalam Anthony Giddens: *Consensus and Controversy*, Ed. Clark,), Modgil, C., dan Modgil, J., Brighton: Falmer Press.
- Avesson, M. and Skoldberg, K., 2000, *Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research*, London: Sage Publications.
- Barnes, 2001, "Symbolic Interaction at the End of the Century", dalam Ritzer, G. and Smart, B., *Handbook of Social Theory*, London: Sage Publications.
- Beilharz, P., 2002, *Sosial Theory: A Guide to Central Thinkers*, Alih Bahasa Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berger, P. And Luckmann., 1967, *The Social Construction of Reality*, Garden City, N.Y.: Doubleday.
- Bryant, C.G.A., and David, 1991, *Giddens' Theory of Structuration: A Critical Appreciation*. London: Routledge.
- Craib, I., 1992, *Anthony Giddens*, London: Routledge.
- Creswell, J.W., 1994, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press Kalangan Sendiri.
- Denzin, N.K., dan Lincoln., 2000, *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Dessler, G., 1992, *Organization Theory: Integrating Structure and Behavior*. Singapore: Simon and Schuster (Asia) Pte. Ltd.
- Giddens, A., 1977, *Studies in Social and Political Theory*. London: Hutchinson.
-, 1979, *Central Problems in Social Theory*. London: Mac Milan.
-, 1984, *The Constitution of Society The Outline of The Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
-, 1989, "A Reply to My Critics" dalam *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and his Critics*, Ed. Held dan Thompson, Cambridge: Cambridge University Press.
-, 1991, *Modernity and Self-Identity*. Cambridge: Polity Press.
-, 2002, *The Third Way The Renewal of social democracy*. Cambridge: Polity Press.
-, 2004, *Sociology Fourth Edition*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Greetz, C., 1961. *The Religion of Java*. Glencoe: The Free Press.
-, 1959a. "The Javanese Kyai: The Changing Role of Cultural Broker", dalam *Comparative Studies in Society and History*, (2): 250-256.
-, 1959b. "The Javanese Village", dalam G William Skinner, (ed.). *Local Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium*. Yale University Cultural Report Series, Southeast Asian Studies.
-, 1973. "Religion as a Cultural System", dalam *The Interpretation of*

Kyai NU dan Politik dalam Prespektif Teori Strukturasi Giddens

- Culture. New York: Basic Book.
- Guba, E., 1990, "The Alternative Paradigm", dalam Guba, E., Ed., *The Paradigm Dialog*, Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Haralambos, M. Holborn, M., dan Heald, 2000, *Sociology: Themes and Perspectives*, Hammersmith: HarperCollins Publisher Ltd.
- Hefner, Robert W. 1987. "Islamizing Java?: Religion and Politics in Rural East Java", dalam *The Journal of Asian Studies*, 46 (3): 533-553.
- Hertz, R., Ed., 1996, "Introduction: Reflexivity and Voice", *Qualitative Sociology*, 19: 3-9.
- Holton, R., 2001, "Symbolic Interaction at the End of the Century", dalam Ritzer, G. and Smart, B., *Handbook of Social Theory*, London: Sage publications.
- Horikoshi, Hiroko, 1976, "A Traditional Leader in a Time of Change: The Kyai and Ulama in West Java". Disertasi Doktor, University of Illinois.
- Ismail SM. 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mansurnoor, 1990, *Islam in an Indonesian World, Ulam of Masura*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Maxweel, Joseph A. 1996. *Qualitative Research Design an Interactive Approach*. California: Sage Publication.
- Neuman. W.L., 1997, *Sosial Research Method: Qualitative and Quantitatif Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.
- Newman, I., dan Benz, C. R., 1998, *Qualitatif - Quantitative Research Methodology : Exploring the Interactive Continuum*, Carbondale: Souther Illinois University Press.
- Rifa'i, Ahmad. 2005. *Islam sebagai Kambing Hitam*. Dalam Media Indonesia tanggal 02-04. Sila e-mel KV di vidya@tm.net.my.
- Ritzer, George, 2000, *Sociological Theory*, Singapore: McGraw-Hill Book. Companies House, Inc.
- Robertson, Roland, 1970, *The Sociological Interpretation of Religion*, New York: Schocken Books.
- Schroeder, Ralph, 1992, *Max Weber and the Sociology of Culture*, London: Sage Publication
- Schlegel, Stuart S. 1977. *Grounded Research di dalam Ilmu-ilmu Sosial*. Aceh: PLPIIS.
- Sparringa, Daniel, 1997, *Discaourse, Democracy an Intellectuals in New Order Indonesia: A Qualitative Sociological Study*, Australia: A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy of The Flinders University of South Australia.
-, 2002, "Analisis Wacana: Sebuah Pendekatan untuk Kajian Sosial Budaya, Prasasti, Jurnal Ilmu dan Seni Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, No. 45/ Tahun Xii/ Mei 2002.
- Suprayogo, Imam, 2007, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, Malang: UIN Malang Press.
- Thompson, John B., 1984, *Ideology and the Analysis of Discourse: A Critical Introduction to the Work of Michel Pecheux* dalam *Studies in The Theori of Ideology*. University of California Press, USA.
- Turmudi, Endang , 2004, *Perselingkuhan Kai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS.
- Turner, Bryan S, 1998, *The Blackwell Companion to Social Theory*, Blackwell Publisher, USA.
- Tischler, Henri L., 1990, *Introduction to Sociology*, Chicago: Holt, Rinehart and Winston.
- Agnim nis nonsectem dolortisl ea aliquat lore magna acidunt vullam erit ute feugueros aut prat. Ut iureet lan ut autpat. Ut nos ectetue do commod etum vulla faci tio eumsan utpat nibh er sum ipis augue